ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA

ANALYSIS OF REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET PERFORMANCE AT THE REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT AGENCY OF GOWA REGENCY

FIRDAWATI

Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Makassar
E-mail:frdwati13@gmail.com

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten gowa dan tingkat kemandirian pemerintah daerah kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksakan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio pertumbuhan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Gowa dilihat dari 1). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah termasuk dalam kategori rendah, 2) Rasio Efektifitas Keuangan Daerah termasuk dalam kategori efektif dimana target PAD yang ditetapkan lebih dari 100%, 3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah termasuk dalam kategori efisien dimana tingkat efisiensi belanja di bawah 100% , 4) Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah termasuk dalam ketegori belum bertumbuh, karena masih ada rasio prtumbuhan yang mengalami penurunan atau bernilai negatif.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Daerah

SUMMARY

This purpose of this research is to know the performance of the revenue and expenditure budget of gowa district and the level of independence of gowa district government. This research is a descriptive quantitative research. This research was conducted at the Regional Financial Management Agency of Gowa Regency. Data collection techniques used are interviews and documentation. Data analysis techniques used are descriptive quantitative using several financial ratios, namely, regional financial independence ratio, PAD effectiveness ratio, regional financial efficiency ratio, and growth ratio. The results of the analysis showed that the performance of gowa district government is seen from 1).Regional Financial Independence Ratio is included in the low category, 2) The Ratio of Regional Financial Effectiveness is included in the effective category where the PAD target set is more than 100%, 3) The Regional Financial Efficiency Ratio belongs to the efficient category where the spending efficiency rate is below 100% , 4) The Regional Financial Growth Ratio is included in the theories has not grown, because there is still a declining or negative value growth ratio.

Keywords: Regional Financial Performance

A. PENDAHULUAN

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya meningkatkan kenyamanan dan keamanan, mutu pendidikan, kesehatan maupun keimanan.

Di era globalisasi saat ini mewujudkan *Good Governance* diperlukan perubahan

paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah daerah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran pada instansi pemerintahan, selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian, juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Sebagai alat akuntabilitas publik, penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran mengenai Kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola Keuangan Daerah.

Tujuan dari pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya, menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi, menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan (Bastian, 2010: 297).

Menilai Kinerja Keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antar anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi yang beguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Menurut Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 laporan Realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi, jika :

a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat,
b. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan
c. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil observasi yang dilakukan dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2012-2014 masih belum mandiri dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah dan termasuk dalam kategori sangat rendah. Rasio efektifitas PAD termasuk dalam kategori efektif dimana target penerimaan PAD lebih dari 100%. Rasio Efisiensi keuangan daerah termasuk dalam kategori efisien dimana tingkat belanja berada dibawah 100%. Rasio pertumbuhan keuangan daerah termasuk dalam kategori belum bertumbuh karena terdapat rasio yang mengalami penurunan atau bernilai negatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan realisasi anggaran keuangan daerah pemerintah Kabupaten Gowa ?
2. Bagaimana tingkat kemandirian daerah Kabupaten Gowa berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah?

B. Kajian Teori

Menurut Saragih (2003: 127), “APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya, jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD)”.

Kinerja keuangan merupakan prestasi yang dapat dicapai pada anggaran yang telah dibuat daerah dengan menganalisis perbedaan antara realisasi dengan target yang diselenggarakan, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sehingga dapat sesuai dengan kriteria penilaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan.

Menurut Mahsun (2006:25) “Kinerja sebagai gambaran pencapaian dalam pelaksanan

suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi".

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa Rasio yang bisa digunakan adalah: a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, b) Rasio Efektifitas PAD , c) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan d) Rasio Pertumbuhan.

C. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa. Sampel yyang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015-2019. Teknik pengumoulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yang terdiri dari beberapa rasio yaitu Rasio Kemndirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Gowa sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 persentasenya sebesar 14,54% dan termasuk dalam kategori kemampuan kinerja keuangan yang sangat rendah berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah

2. Rasio Efektifitas PAD

Secara rata-rata realisasi efektifitas di atas dapat diketahui bahwa rasio efektifitas Kabupaten Gowa dalam melakukan pemungutan sumber pendapatan daerah tahun anggaran 2015-2019 mencapai 106,43% .

3. Rasio Efisiensi

Selama periode tahun 2015-2019, tingkat efisiensi dari belanja daerah Kabupaten Gowa termasuk dalam kategori efisien. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat efisiensi di bawah 100% dengan rata-rata efisiensi 93%.

4. Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan perhitungan rasio pertumbuhan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah dinilai belum efektif karena terbukti dalam perhitungan rasio diatas masih terdapat rasio pertumbuhan yang mengalami penurunan dan bernilai negatif.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa keimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang diukur melalui Pendapatan Asli Daerah selama tahun anggaran 2015-2019 termasuk dalam kategori rendah dan masih belum mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik.

2. Rasio efektifitas keuangan daerah terhadap pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa selama tahun anggaran 2015-2019 termasuk dalam kategori efektif, karena realisasi PAD lebih besar dibandingkan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dan kontribusi yang diberikan terhadap anggaran yang telah ditetapkan lebih dari 100%.

3. Rasio Efisiensi keuangan daerah Kabupaten Gowa selama tahun anggaran 2015-2019 termasuk dalam kategori efisien. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat efisiensi belanja dibawah 100%.

4. Rasio Pertumbuhan keuangan daerah Kabupaten Gowa selama tahun anggaran 2015-2019 termasuk dalam kategori belum bertumbuh, karena masih terdapat rasio pertumbuhan yang mengalami penurunan atau bernilai negatif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

   Pemerintah Kabupaten Gowa harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap dana ekstern dapat diminimalisir. Pemerintah juga harus mampu meningkatkan komponen pada rasio pertumbuhan mengingat pada perhitungan rasio pertumbuhan masih terdapat penurunan dan bernilai negatif. Pemerintah Kabupaten Gowa juga diharapkan meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan

daerah ataupun dengan melakukan perekruta pegawai yang ahli dalam bidang keuangan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih rinci lagi dalam menganalisa laporan keuangan daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Artanti, Nining Yunia.2010. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Magetan 2007).* Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Halim, Abdul, 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Budi.

Mahsun, Mohammad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta : BPFE.

Mamesah, DJ. 2008. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah.* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.